

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abidin Bagir, Zainal, 2019, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Yogyakarta.

Arinanto, Satya, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aziz, Eko, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 1998, *Mencari Kedaulatan Rakyat*, Mizam Pustaka, Jakarta.

Bahar, Syaфроeddin, 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Claude, Richard P, (ed), 1977, *Comparative Human Rights*, the John Hopkins University Press, London.

El-Muhtaj, Majda, 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Fatkurohman, *et.al.*, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditia Bhakti, Bandung.

Fahmi, Khairul, 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.

- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, Kerjasama Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta
- Huda, Ni'matul, dan Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama Nusa Media, Bandung.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, 2002, *Ilmu Perundang-undangan*, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta.
- Kristanto, Tria Agung, 2010, *Demokrasi Konstitusional; Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh, Roisul Muttaqien, General Theory of Law and State, cetakan kesembilan, Nusa Media, Bandung.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi; Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Magnis Suseno, Frans, 1992, *Filsafat Kebudayaan Politik dan Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Martanto, Syahrial, 2010, *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional*, Amicus Curiae Elsam, Jakarta.
- Morris, Clarence, (eds), 1979, *The Great Legal Philosophers*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *HAM dan Demokrasi-Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Kata Penerbit, Jakarta
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1996, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademika, Bandung.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sabon, Max Boli, 2014, *Hak Asasi Manusia; Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Susanti, Bivitri, 2007, *Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, cetakan keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Slamet Kurnia, Titon, 2015, *Interpretasi Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tocqueville, Alexis de, 2003, *Democracy in America And Two Essay on America*, Penguin Books, London.
- Tohari, A. Ahsin, 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Waldron, Jeremy, 1999, *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press.

## **MAKALAH**

- Asshiddiqie, Jimly, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Makalah* yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

Aswanto, “Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai Perwujudan Demokrasi”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Demokrasi, Hukum dan HAM bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Parpol, Ormas dan LSM Provinsi Sulawesi Selatan, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi di Hotel Grand Palace Makassar, 31 Oktober 2007.

Candra, Galuh Purnamasari, “Problematika Penarapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia”, *Makalah* disampaikan dalam Seminar Internasional Developing Legal System to Promote Sosial Welfare, Jakarta 15 Maret 2012.

Harun, Refly, “Penafsiran Konstitusi (*Constitutional Interpretation*)”, *Makalah* Disampaikan sebagai Bahan Ajar dalam perkuliahan Pengujian Undang-Undang Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober 2018.

Harjono, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi” *Makalah* disampaikan pada Kuliah Umum untuk Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Sabtu, 28 Oktober 2009

Kalla, M Yusuf, “Penegakan Hukum Indonesia Selama Era Reformasi”, *Makalah* disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam Rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011.

## **JURNAL DAN HASIL PENELITIAN**

Bisariyadi, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, *Laporan Hasil Penelitian*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Tahun 2016

Chakim, M. Lutfi, “Prinsip Proporsionalitas”, di Rubrik Kamus Hukum *Majalah Konstitusi*, No 139 September 2018.

Fahmi, Khairul, 2019, “Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas”, *Disertasi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Manan, Bagir & Dwi Harijanti, Susi, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Tahun 2016.

Dominic McGoldrick, “The Interface Between Public Emergency Powers And

International Law”, *International Journal of Constitutional Law*, Volume, 2, April 2004.

Isra, Saldi & Amsari, Feri, “Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Konstitusi” *Jurnal Konstitusi PUSaKO FH Unand* Vol. 1, 1 Nov 2008.

Isra, Saldi, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Romario H, 2017, “Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights di Indonesia Studi Kasus Pemblokiran Situs Berita Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika”, *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sefriani, “Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan Dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik” *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, September 2012.

Ummul Firdaus, Sunny, 2016, “Pembatasan Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Tentang Formulasi Parliamentary Threshold Dan Electoral Threshold)”, *Disertasi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yasin, Johan, “Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. V. No. 1, Fakultas Hukum Unisba, Bandung. 2003.

## **INTERNET**

Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, diunduh dari [www.mk-ri.or.id](http://www.mk-ri.or.id), 1 Desember 2019.

Syafaat, Ali, “Penafsiran konstitusi”, diunduh dari <http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/ii/Penafsiran-Konstitusi.pdf>, 03 September 2019.

Lailam, Tanto, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, diunduh dari <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/penafsiran-konstitusi-dalam-pengujian-konstitusionalitas-undang-undang-terhadap-undang-undang-dasar-1945/>, 05 Desember 2019.

G., Miller, B., & Webber, G. “Proportionality & the Rule of Law: Rights,

Justification, Reasoning”, diakses dari SSRN:  
<https://ssrn.com/abstract=2334434>, 12 Desember 2019

Americans Asosiasi For The International Commission Of Jurist, 1985, *Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions in The International Covenant on Civil and Political*, Chene-Bougeries Geneva, Switzerland, April 1985, diunduh dari <https://www.icjr.org>1984/07>, 12 Desember 2019.

Mulyana, Asep, 2014 *Unofficial Translation Prinsip-Prinsip Siracusa Mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konvenan International tentang Hak Sipil dan Politik*, diunduh dari <https://pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&lang=id&id=112>, 12 Desember 2019.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Keputusan Presiden. Republik Indonesia Serikat 31 Djanuari Tahun 1950 Nomor. 48, Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 3).

Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 56).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945, 28 Juli 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Terhadap UUD 1945, 26 Maret 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 23 Juli 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap UUD 1945, 8 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 065/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap UUD 1945, 3 Maret 2005.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 072-073/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap UUD 1945, 3 Maret 2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap UUD 1945, 13 Desember 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap UUD 1945, 13 September 2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 019-020/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD 1945, 28 Maret 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, 19 Desember 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945, 20 Desember 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 021/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap UUD 1945, 12 Januari 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, 17 Juli 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945, 11 Desember 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-V/2007



Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman Terhadap UUD 1945, 30 April 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945, 6 Mei 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-IV/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap UUD 1945, 15 Agustus 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 24 Februari 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 4 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap UUD 1945, 22 Juli 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945, 12 Januari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap UUD 1945, 30 Desember 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden terhadap UUD 1945, 3 Juli 2009.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, 6 Juli 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD 1945, 31 Desember 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD 1945, 10 November 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap UUD 1945, 19 April 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 152/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 15 Oktober 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, 24 Februari 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945, 13 Oktober 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945, 1 Mei 2012.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945, 26 April 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, 19 September 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, 3 Maret 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, 18 Oktober 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap UUD 1945, 15 Januari 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 505 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, 3 Januari 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, 19 September 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XI/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945, 31 Oktober 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 12 Juni 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD 1945, 18 Juli 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 13 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, 6 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945, 23 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terhadap UUD 1945, 13 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap UUD 1945, 13 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945, 15 Juni 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, 11 Januari 2017.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, 10 Juli 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, 7 September 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, 10 Oktober 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 19 Juli 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945, 25 Januari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap UUD 1945, 31 Agustus 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945, 7 November 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945, 31 Januari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, 14 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap UUD 1945, 7 November 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap UUD 1945, 26 April 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, 9 Mei 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, 23 Mei 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, 24 Januari 2019.